

AULADUNA: Jurnal Pendidikan Dasar Islam

Vol. 7 No. 2, Desember 2020, pp. 145-153

p-ISSN: 2407-2451, e-ISSN: 2621-0282

DOI: <https://doi.org/10.24252/auladuna.v7i2a4.2020>

IDENTIFIKASI DAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSI BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SEKOLAH DASAR SUMATERA BARAT

IDENTIFICATION AND IMPLEMENTATION OF INCLUSION EDUCATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS IN WEST SUMATRA PRIMARY SCHOOLS

Siska Angreni¹, Rona Taula Sari²

^{1,2}Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bung Hatta

^{1,2}Jl. Bagindo Aziz Chan Jl. By Pass, Aie Pacah, Kec. Koto Tangah, Sumatera Barat

Email: siskaangreni@bunghatta.ac.id¹, ronataulasari@bunghatta.ac.id²

Submitted: 13-10-2020, Revised: 04-12-2020, Accepted: 07-12-2020

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan identifikasi dan pelaksanaan pendidikan inklusi bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di sekolah dasar Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara dengan partisipan. Subjek penelitian ini adalah guru-guru sekolah dasar di Sumatera Barat yang terdiri dari lima kabupaten atau kota yang berjumlah 50 sekolah dasar. Hasil temuan penelitian antara lain: (1) kelainan yang dimiliki peserta didik berkebutuhan khusus di 50 sekolah dasar yang tersebar di Sumatera Barat relatif sama yaitu lamban belajar dan tuna grahita ringan, (2) penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah dasar Sumatera Barat kurang berjalan dengan baik, dan (3) kendala implemetasi pendidikan inklusi adalah kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah serta biaya untuk pengadaan sarana pendidikan inklusi relatif sedikit, pemahaman guru terhadap peserta didik berkebutuhan khusus masih sangat minim.

Kata Kunci: Pendidikan Inklusi, Anak Berkebutuhan Khusus

Abstract

This study aimed to describe the identification and implementation of inclusive education for children with special needs in elementary schools of West Sumatra. This study used a descriptive method with a qualitative approach. Data collection was done through direct observation and interviews with the participants. The research's subjects were elementary school teachers in West Sumatra, which consisted of five districts or cities covering 50 primary schools. The results of the research findings included: (1) the disabilities possessed by students with special needs in 50 elementary schools in West Sumatra were relatively the same, namely slow learning and mild mentally disabled, (2) the implementation of inclusive education in primary schools of West Sumatra was not running well, and (3) the obstacles of inclusive educational implementation were the lack of facilities and infrastructure owned by schools, relatively few costs for the provision of inclusive education facilities, and teachers' understanding of students with special needs was still limited.

Keywords: Inclusive Education, Children with Special Needs

How to Cite: Angreni, S., & Sari, R. T. (2020). Identifikasi dan Implementasi Pendidikan Inklusi bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar Sumatera Barat. *AULADUNA: Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 7(2), 145-153.

1. Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak dasar untuk semua individu dan fondasi untuk pembelajaran seumur hidup. Melalui ilmu pengetahuan diharapkan individu mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya sehingga dapat bersaing dalam masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan semua individu memperoleh pendidikan yang layak, termasuk untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Selama ini anak berkebutuhan khusus mengikuti pendidikan yang sesuai dengan kelainannya yaitu di Sekolah Luar Biasa (SLB). Secara tidak langsung hal ini telah mendiskriminasi anak berkebutuhan khusus, akibatnya menghambat proses saling mengenal antara anak reguler dengan anak berkebutuhan khusus. Dampaknya anak berkebutuhan khusus menjadi tersingkirkan dalam berinteraksi dengan masyarakat. Untuk mewujudkan interaksi dan pemenuhan hak belajar semua anak serta dapat merangkul keberagaman, maka bagi seluruh anak di Indonesia maka muncullah konsep pendidikan inklusi (Rasmitadila, 2020). Menurut Anjarsari (2018), pendidikan inklusi merupakan suatu Pendidikan yang menerima semua peserta didik dengan kebutuhan khusus di sekolah reguler yang berlokasi di daerah tempat tinggal mereka dan mendapatkan berbagai pelayanan pendukung dan pendidikan sesuai dengan kebutuhannya. Pendidikan inklusif juga dapat didefinisikan sebagai proses, filosofi, dan praktek pendidikan (Zabeli, Shehu, & Anderson, 2020). Pendidikan inklusif melibatkan gagasan tentang bagaimana pendidikan dan sekolah harus diatur (Mieghem, Verschueren, Petry, & Struyf, 2018). Inklusi sangat bergantung pada sikap guru terhadap peserta didik (Saloviita, 2020).

Menurut Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 menyatakan bahwa pendidikan inklusif merupakan penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan serta potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya (Taufan & Mazhud, 2014). Undang-undang di atas menjelaskan bahwa anak berkebutuhan khusus juga berhak mendapat pendidikan yang sama dengan anak normal lainnya. Artinya, sekolah inklusif adalah sekolah umum yang mengakomodasi semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus tanpa menghiraukan kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, atau kondisi lain mereka. Sekolah inklusif sebagai sarana yang ditujukan untuk menanggapi berbagai kebutuhan dari semua peserta didik baik umum maupun berkebutuhan khusus melalui peningkatan partisipasi dalam belajar, budaya, dan masyarakat. Pendidikan inklusif diharapkan bisa mengakomodasi kebutuhan anak berkebutuhan khusus untuk mengenyam pendidikan seperti peserta didik lainnya.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan, diperoleh data bahwa sekitar 211 sekolah dasar inklusi yang tersebar di 5 kabupaten dan kota Sumatera Barat. Sebaran sekolah dasar inklusi di 5 kabupaten dan kota yaitu Kota Padang 79 sekolah, Kab. Pesisir selatan 34 sekolah, Kab. Pasaman 29, Kab Lima Puluh Koto 32 sekolah, Kab. Padang Pariaman 37 sekolah (Direktorat Pembinaan PKLK, 2017). Sejalan dengan surat edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendiknas Nomor 380/C.6/MN/2003 yakni setiap kabupaten atau kota diwajibkan menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan inklusi sekurang-kurangnya 4 sekolah setiap jenjangnya (Husen, 2018). Hal ini menjelaskan bahwa propinsi Sumatera Barat sudah menyelenggarakan pendidikan inklusi, hanya saja ABK yang belajar di sekolah inklusi belum teridentifikasi secara keseluruhan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 pasal 129 ayat (3), peserta didik yang berkelainan terdiri dari tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, lamban

belajar, autisme, memiliki gangguan motorik, dan menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat dan zat aditif lain (Rasmitadila, 2020).

Tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) untuk mengidentifikasi keberadaan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan jenis ketunaannya di Sekolah Dasar (SD) penyelenggara pendidikan inklusi di Sumatera Barat, (2) untuk memaparkan implementasi pendidikan inklusi sekolah dasar di Sumatera Barat, dan (3) untuk mengidentifikasi kendala dalam implementasi pendidikan inklusi di Sumatera Barat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusi di Kota Padang, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Pasaman, Kab. Padang Pariaman, dan Kab. Lima Puluh Koto yang berjumlah 211 sekolah dasar (Direktorat Pembinaan PKLK, 2017). Namun, yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 50 sekolah dasar. Teknik pengambilan sampel adalah *nonprobability sampling* dengan cara *purposive sampling* yaitu memilih sekolah yang teridentifikasi keberadaan ABK. Instrumen atau alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung dan wawancara. Observasi langsung dilakukan dengan teknik partisipan yaitu peneliti langsung mengobservasi keberadaan anak berkebutuhan khusus di sekolah. Wawancara dilakukan kepada kepala sekolah dan guru kelas yang didalam kelasnya terdapat anak berkebutuhan khusus. Teknik analisis data dilakukan adalah pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan langkah triangulasi. Triangulasi yang dilakukan adalah triangulasi sumber (Nazir, 2009).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil

Data dalam penelitian ini diperoleh dari 50 sekolah dasar negeri dan swasta yang tersebar di beberapa kabupaten/kota di Sumatera Barat. Rincian perolehan data dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Daftar Nama Sekolah dan Kelainan Anak Berkebutuhan Khusus di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang

Nama Sekolah	Kab/Kota	Kelas	Inisial Anak	Jenis Kelainan
SDN 13 Bukit Kaciak, Air Haji	Kab. Pesisir Selatan	V	DS	Tuna Grahita Ringan
SDN 33 Padang Mandiangin	Kab. Pesisir Selatan	II	D	Lamban belajar
UPT SDN 23 Apa Jaya, Bayang	Kab. Pesisir Selatan	VI	AR	Lamban belajar
SDN 04 Koto Bangun	Kab. Pesisir Selatan	1	NI	Tuna Grahita
SDN 08 Sasak Ranah Pesisir	Kab. Pesisir Selatan	I	GS	Tuna Grahita
SDN 08 Pasar Surantih	Kab. Pesisir Selatan	III,IV	D, F,T	Tuna netra, kesulitan belajar

Nama Sekolah	Kab/Kota	Kelas	Inisial Anak	Jenis Kelainan
SDN 02 Cupak Tengah	Kota Padang	III	RD	Autis
SD Telkom Padang	Kota Padang	IV,V	AA	Kesulitan Belajar
SDN 08 Painan	Kab. Pesisir Selatan	III	YA	Tuna Laras
SDN 25 Bukit Kecil	Kab. Pesisir Selatan	III	RP	Tuna Grahita
SDN 53 Kuranji	Kota Padang	V	JA	Lamban Belajar
SDN 06 Kampung Lapai	Kota Padang	V	RA	Lamban Belajar
UPT SDN 09 Air Pura	Kab. Pesisir Selatan	III	R	Tuna Netra
SDN 19 Pasar Lama	Kab. Pesisir Selatan	III	R	Kesulitan Belajar
SDN 02 Situjuah Banda Dalam	Kota Padang	IV	MA	Tuna laras
SDN 58 Lubuk Buaya	Kota Padang	I	K	Tuna Grahita
SDN 44 Sungai Lareh	Kota Padang	IV	LB	Lamban Belajar
SDN 04 Gaung	Kota Padang	VI	MF	Lamban Belajar
SDN 46 Koto Panjang	Kota Padang	IV	NS	Tuna Laras
SDN 08 Pancung Soal	Kab. Pesisir Selatan	I	H	Lamban belajar
UPT SDN 10 Kayu Gadang	Kab. Pesisir Selatan	III	MF	Lamban Belajar
SDN 15 Padang Sarai	Kota Padang	V	BB	Kesulitan Belajar
SD IT Nurisma Sutera	Kab. Pesisir Selatan	III	R	Tuna wicara
SDN 07 Pasar Salido	Kab. Pesisir Selatan	V	UP	Tuna Grahita
SDN 29 Dadok Tunggul Hitam	Kota Padang	I	PP	Tuna laras

Tabel 2. Daftar Nama Sekolah dan Kelainan Anak Berkebutuhan Khusus di Kabupaten Pasaman, 50 Koto, Padang Pariaman

Nama Sekolah	Kabupaten	Kelas	Inisial Anak	Jenis Kelainan
SDN 01 Sungai Beremas, Air Bangis,	Pasaman	1	M	Lamban Belajar
SDN 02 Maringging, Tigo Nagari,	Pasaman	VI	AS, AP	Lamban belajar
SDN 04 Padang Ganting	Tanah Datar	VI	RA	Tuna daksa
SDN 06 Situjuah Gadang	50 Kota	III	IF	Tuna Grahita ringan
SDN 15 Sungai Geringging	Padang Pariaman	I	A	Lamban Belajar
SDN 02 Pasaman	Pasaman	V	DW	Autis

Nama Sekolah	Kabupaten	Kelas	Inisial Anak	Jenis Kelainan
SDN 09 Guguak VII Koto	50 Kota	I	MR	Lamban Belajar
SDN 09 Ranah Batahan	Pasaman Barat	IV	MW	Lamban Belajar
SDN 09 Pangkalan	50 Kota	IV	SD	Tuna Netra
SDN 05 Pasar Tiku	50 Kota	V	MA	Lamban Belajar
MIN 2 Pasaman Barat	Pasaman Barat	IV	F	Tuna Grahita ringan
SDN 02 Koto Alam	50 Kota	V	AP	Lamban Belajar
SDN 27 Batu Bulek	Tanah Datar	I	MR	Tuna grahita ringan
UPTD SDN 03 Sungai Kamuyang	50 Kota	IV	MF	Lamban Belajar
SDN 32 Sungai Limau	Padang Pariaman	IV	T	Tuna Grahita ringan
Madrasah Ibtidaiah swasta	50 Kota	V	RF	Tuna grahita
UPTD SDN 03 Tanjung bungo	50 Kota	I	DZ	Kesulitan Belajar
SDN 13 Pandam	Pasaman	VI	AI	Lamban belajar
SDN 03 Koto Bangun	50 Kota	III	L	Tuna grahita
SDN 02 Tanjuang Bungo	50 Kota	II	MSR	Kesulitan Belajar
SDN 12 Enam Lingkung	Padang Pariaman	II	MF	Tuna laras
UPTD SDN 06 Sialang	50 Kota	I	AA	Lamban Belajar
SDN 02 Maek	50 Kota	III	R	Autis
SDN 03 Sintoga	Padang Pariaman	II	DS	Tuna grahita ringan
SDN 25 Sungai Limau	Padang Pariaman	IV	RA	Tuna Wicara

Berdasarkan kedua tabel tersebut menunjukkan tidak terdapat variasi kelainan yang dialami peserta didik. Jenis kelainan yang dialami dominan lamban belajar dan tuna grahita ringan yang mengakibatkan mereka kesulitan memahami pelajaran di sekolah.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan guru kelas mengenai proses pembelajaran diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3. Persentase Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah dan Guru.

Indikator Pertanyaan	Persentase
Penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah reguler	96
Kesiapan guru dalam mengajar peserta didik berkebutuhan khusus	76
Mengikuti pelatihan/workshop pendidikan inklusi	72

Indikator Pertanyaan	Persentase
Dukungan terhadap peserta didik berkebutuhan khusus untuk bersekolah di sekolah reguler	92
Dukungan dari kepala sekolah program pendidikan inklusi	90
Apakah sama RPP yang dirancang untuk peserta didik berkebutuhan khusus	80
Penempatan peserta didik berkebutuhan khusus di kelas	100
Apakah metode pembelajaran untuk peserta didik berkebutuhan khusus sama dengan reguler	50
Upaya pemerintah untuk menyukseskan pendidikan inklusi	96
Kelengkapan saran dan prasarana yang dimiliki	45
Alokasi dana untuk pendidikan inklusi	56

3.2. Pembahasan

3.2.1 Identifikasi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar Sumatera Barat

Berdasarkan data di tabel 1 dan tabel 2 yang diperoleh dari responden tentang peserta didik berkebutuhan khusus di berbagai sekolah inklusi di Sumatera Barat dapat dilihat jenis kelainan pada peserta didik berkebutuhan khusus relatif sama yaitu lamban belajar dan tuna grahita ringan. Ditinjau dari proses pembelajaran, sebaiknya guru melakukan suatu modifikasi baik dari aspek materi maupun metode pembelajaran yang digunakan. Hal ini sejalan dengan pendapat Riadin, Misyanto, & Usop (2017) yang menyatakan bahwa kesulitan belajar yang dialami bisa menyebabkan peserta didik mengalami kebingungan menjawab tugas.

3.2.2 Implementasi Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar

Ada beberapa indikator yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah dasar diantaranya klaster kelas inklusi, sumber daya manusia (guru kelas dan guru pendamping khusus), perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran, evaluasi, sarana dan prasarana, dan sebagainya (Harahap & Hastina, 2017). Namun, dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada kesiapan guru dalam mengajar anak berkebutuhan khusus serta anak normal, sarana dan prasarana, perencanaan pembelajaran, dan pembagian kelas untuk ABK. Berdasarkan wawancara dengan guru, untuk mengetahui kesiapan guru dalam mengajar ABK di kelas normal diperoleh hasil 76% guru belum siap sepenuhnya mengajar ABK. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman guru terhadap ABK serta kemampuan yang dimilikinya. Pratiwi (2015) menambahkan bahwa terjadi penolakan dari guru dan lemahnya dukungan terhadap anak berkebutuhan khusus disebabkan karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan guru tentang anak kebutuhan khusus. Hal ini karena latar belakang pendidikan yang tidak memberikan bekal kepada guru tentang anak berkebutuhan khusus menjadi penyebab penolakan dari guru adanya kebijakan sekolah inklusi. Guru berasumsi dirinya tidak memiliki keterampilan untuk mengajar peserta didik dengan berbagai kebutuhan khusus, namun kebijakan telah menuntut mereka untuk menerima keberadaan dan mengajar anak berkebutuhan khusus di kelas mereka. Meskipun demikian 92% guru-guru sangat mendukung dan setuju jika anak yang berkebutuhan khusus mengikuti pelajaran di sekolah reguler, karena anak tersebut bisa bersosialisasi dengan peserta didik normal lainnya. Hal ini sejalan pendapat Wardani (2012) yang menyatakan bahwa sekolah inklusi juga memungkinkan anak berkebutuhan khusus

belajar bersama dengan anak normal, dan diperlakukan selayaknya anak normal. Penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah reguler memberikan dampak positif untuk anak berkebutuhan khusus baik dari segi psikologis, sosial, dan daya pikirnya. Mereka bisa mengembangkan kompetensi sosial dan kepercayaan dirinya. Maka sangat diperlukan dukungan dari semua pihak terutama sekolah penyelenggara, kurang lebih 90% peran kepala sekolah sangat mendukung penyelenggaraan program pendidikan inklusi berdasarkan data wawancara dengan kepala sekolah. Di samping itu guru juga menyatakan pendidikan inklusi bisa mencapai kesuksesan dengan memberikan pelatihan kepada guru-guru mengenai pendidikan inklusi.

3.2.3 Kendala Implementasi Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar

Selain manfaat yang diperoleh dari penyelenggaraan sekolah inklusi bagi anak berkebutuhan khusus, ada kendala dihadapi dari penyelenggaraan sekolah inklusi secara penuh. Kendala tersebut berasal dari dalam maupun dari luar sekolah. Adapun kendala yang dihadapi antara lain:

3.2.3.1 Sarana dan Prasarana

Berdasarkan wawancara hanya 45% sekolah yang cukup memadai sarana untuk pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Penyelenggaraan pendidikan inklusi tidak lepas dari sarana yang dimiliki sekolah. Kebutuhan sarana sesuai dengan kebutuhan peserta didik menjadi kendala pelaksanaan pembelajaran di kelas. Misalnya kelas fasilitas jalan khusus anak tuna daksa, alat bantu pendengaran untuk anak tuna rungu, buku/huruf braile untuk anak tuna netra, dan sarana lainnya (Saputra, 2016). Keterbatasan sarana yang dimiliki sekolah berdampak kepada kurangnya pelayanan yang diberikan bagi anak berkebutuhan khusus. Meskipun sekolah mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusi namun minimnya biaya untuk pengadaan sarana dan prasarana menjadi faktor kendala implementasi pendidikan inklusi. Hal ini sejalan pendapat Ervianti (2018), suatu proses akan terlaksana sesuai dengan prosedur jika pengelolaannya sesuai dengan standar yang berlaku. Pengelolaan merupakan standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan Pendidikan.

3.2.3.2 Kemampuan Guru dalam Mengajar dan Kurangnya Pelatihan

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh sekitar 72% guru belum pernah mengikuti pelatihan tentang pendidikan inklusi baik yang diadakan sekolah maupun pemerintah daerah. Faktor tersebut juga memberikan pengaruh terhadap pembelajaran yang diberikan guru dalam kelas. Kurangnya keterampilan dan pemahaman guru dalam mengajar anak berkebutuhan khusus menjadi salah satu kendala suksesnya pendidikan inklusi. Sekitar 80% guru mengatakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk peserta didik berkebutuhan khusus sama dengan peserta didik yang normal, hanya 10% guru yang melakukan modifikasi, itupun di kegiatan pembelajaran. Lebih kurang 50% guru melakukan pendekatan langsung terhadap peserta didik berkebutuhan khusus dalam pembelajaran dengan menjelaskan materi secara berulang.

3.2.3.3 Penempatan Anak Berkebutuhan Khusus di Kelas

Penempatan peserta didik di kelas berdasarkan tes IQ yang dilakukan pada saat mereka masuk sekolah. Pihak sekolah menempatkan peserta didik berkebutuhan khusus berdasarkan kelainan yang dimilikinya. Tetapi hampir 100% mereka ditempatkan di kelas normal/reguler bersama peserta didik normal lainnya. Jadi peserta didik berkebutuhan khusus belajar sepanjang hari dengan peserta didik normal, hal ini

menyebabkan kurangnya pemahaman peserta didik berkebutuhan khusus terhadap materi tertentu. Adapun model penempatan peserta didik berkebutuhan di Indonesia adalah kelas reguler (inklusi penuh), kelas reguler dengan *cluster*, kelas reguler dengan *pull out*, kelas reguler dengan *cluster* dan *pull out*, dan kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian. Jika penempatan ABK sesuai dengan kelasnya, maka keberhasilan peserta didik berkebutuhan khusus bisa tercapai sepenuhnya (Baharun & Awwaliyah, 2018).

4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka disimpulkan sebagai berikut: (1) kelainan yang dimiliki peserta didik berkebutuhan khusus di 50 sekolah dasar yang tersebar di Sumatera Barat relatif sama yaitu lamban belajar dan tuna grahita ringan, (2) implementasi pendidikan inklusi bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di sekolah dasar Sumatera Barat kurang berjalan dengan baik, dan (3) kendala implementasi pendidikan inklusi adalah kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah serta biaya untuk pengadaan sarana pendidikan inklusi relatif sedikit, pemahaman guru terhadap peserta didik berkebutuhan khusus masih sangat minim, dan penempatan peserta didik berkebutuhan khusus di kelas reguler tidak berpedoman kepada tipe-tipe kelas inklusi. Akibatnya, pemahaman peserta didik terhadap materi menjadi berpengaruh.

Daftar Pustaka

- Anjarsari, A. D. (2018). Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi pada Jenjang SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Sidoarjo. *JPI (Jurnal Pendidikan Inklusi)*, 1(2), 91–104. <https://doi.org/10.26740/inklusi.v1n2.p91-104>
- Baharun, H., & Awwaliyah, R. (2018). Pendidikan Inklusi bagi Anak Berkebutuhan Khusus dalam Perspektif Epistemologi Islam. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 5(1), 57–71. <http://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/modeling/article/view/209>
- Direktorat Pembinaan PKLK. (2017). *Aplikasi Berbasis Informasi*. Takola.Pklk.Kemdikbud.Go.Id. <http://takola.pklk.kemdikbud.go.id/abi/index.php/>
- Ervianti, E. (2018). *Evaluasi Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusi di SD Negeri Kalukuang III Kota Makassar* [Universitas Negeri Makassar]. <http://pustaka.unm.ac.id/opac/detail-opac?id=47180>
- Harahap, D., & Hastina, N. (2017). Implementasi Pendidikan Inklusif SDN No. 067261 Medan Marelan. *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu UNA 2017*, 1119–1125. <https://doi.org/10.31227/osf.io/reuk2>
- Husen, H. B. (2018). *Pendidikan Inklusi Anak Berkebutuhan Khusus*. FKIP Universitas Bunghatta.
- Mieghem, A. Van, Verschueren, K., Petry, K., & Struyf, E. (2018). An Analysis of Research on Inclusive Education: A Systematic Search and Meta Review. *International Journal of Inclusive Education*, 24(6), 675–689. <https://doi.org/10.1080/13603116.2018.1482012>
- Nazir, M. R. S. (2009). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Pratiwi, J. C. (2015). Sekolah Inklusi untuk Anak Berkebutuhan Khusus: Tanggapan terhadap Tantangan Kedepannya. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan*

-
- “Meretas Sukses Publikasi Ilmiah Bidang Pendidikan Jurnal Bereputasi,” 237–242. <https://media.neliti.com/media/publications/172228-ID-sekolah-inklusi-untuk-anak-berkebutuhan.pdf>
- Rasmitadila. (2020). *Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*. Raja Grafindo Persada.
- Riadin, A., Misyanto, M., & Usop, D. S. (2017). Karakteristik Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar Negeri (Inklusi) di Kota Palangka Raya. *Anterior Jurnal*, 17(1), 22–27. <https://doi.org/10.33084/anterior.v17i1.17>
- Saloviita, T. (2020). Attitudes of Teachers Towards Inclusive Education in Finland. *Scandinavian Journal of Educational Research*, 64(2), 270–282. <https://doi.org/10.1080/00313831.2018.1541819>
- Saputra, A. (2016). Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Inklusif. *Golden Age Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*, 1(3), 1–14. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/index.php/goldenage/article/view/1929>
- Taufan, J., & Mazhud, F. (2014). Kebijakan-Kebijakan Kepala Sekolah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah X Kota Jambi. *Jurnal Penelitian Pendidikan UPI*, 14(1), 62–75. <https://ejournal.upi.edu/index.php/JER/article/view/3213>
- Wardani, I. G. A. . (2012). *Pengantar Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. Universitas terbuka.
- Zabeli, N., Shehu, B. P., & Anderson, J. A. (2020). The The Understanding of Inclusive Education in Kosovo: Legal and Empirical Argumentation. *Center for Educational Policy Studies Journal*, 1–21. <https://doi.org/10.26529/cepsj.692>